



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : LG.00/1189/DPDRI/XI/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat Koordinasi

Jakarta, 25 November 2025

**Kepada Yth.
Bupati
(Daftar Terlampir)
di
Tempat**

Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan telah ditetapkan dalam daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025. Pada masa persidangan ini, Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI) akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kehadiran Bapak/Ibu Bupati, dengan menggunakan anggaran dari daerah masing-masing pada Rapat Koordinasi Nasional yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Desember 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.
Agenda : Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Daerah Kepulauan Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025
Dresscode : Baju Batik Lengan Panjang
TOR : Terlampir

Untuk koordinasi lebih lanjut mengenai hal-hal teknis, dapat berkoordinasi dengan Sekretariat PPUU DPD RI, Sdr. Kiki Mikkail Massardi dengan nomor kontak 0822-5870-3208 serta email: ppuu@dpd.go.id.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu Bupati, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Jenderal DPD RI,
Komjen Pol. H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.
NRP. 70070207

Tembusan Yth:

1. Pimpinan DPD RI;
2. Pimpinan PPUU DPD RI; dan
3. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI.

Lampirat Surat

Nomor : LG.00/1189/DPDRI/XI/2025

Tanggal : 25 November 2025

**DAFTAR UNDANGAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL AKSELERASI
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH
KEPULAUAN DALAM PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2025
DI GEDUNG NUSANTARA V MPR/DPR/DPD RI
TANGGAL 2 DESEMBER 2025**

1. Provinsi Aceh

- 1) Bupati Aceh Singkil

2. Provinsi Sumatera Barat

- 1) Bupati Kepulauan Mentawai

3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 1) Bupati Bangka
- 2) Bupati Belitung
- 3) Bupati Bangka Selatan
- 4) Bupati Bangka Tengah
- 5) Bupati Bangka Barat
- 6) Bupati Belitung Timur

4. Provinsi Kepulauan Riau

- 1) Bupati Natuna
- 2) Bupati Kepulauan Anambas
- 3) Bupati Karimun
- 4) Bupati Lingga
- 5) Bupati Bintan

5. Provinsi Jawa Timur

- 1) Bupati Sumenep

6. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

- 1) Bupati Bima
- 2) Bupati Dompu
- 3) Bupati Lombok Barat
- 4) Bupati Lombok Tengah
- 5) Bupati Lombok Timur
- 6) Bupati Sumbawa
- 7) Bupati Sumbawa Barat
- 8) Bupati Lombok Utara

7. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

- 1) Bupati Alor
- 2) Bupati Belu
- 3) Bupati Ende
- 4) Bupati Flores Timur
- 5) Bupati Kupang
- 6) Bupati Lembata

- 7) Bupati Manggarai
- 8) Bupati Ngada
- 9) Bupati Sikka
- 10) Bupati Sumba Barat
- 11) Bupati Sumba Timur
- 12) Bupati Timor Tengah Selatan
- 13) Bupati Timor Tengah Utara
- 14) Bupati Rote Ndao
- 15) Bupati Manggarai Barat
- 16) Bupati Nagekeo
- 17) Bupati Sumba Barat Daya
- 18) Bupati Sumba Tengah
- 19) Bupati Manggarai Timur
- 20) Bupati Sabu Raijua
- 21) Bupati Malaka

8. Provinsi Sulawesi Utara

- 1) Bupati Kepulauan Sangihe
- 2) Bupati Kepulauan Talaud
- 3) Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)
- 4) Bupati Minahasa Utara

9. Provinsi Sulawesi Tengah

- 1) Bupati Banggai Laut

10. Provinsi Sulawesi Selatan

- 1) Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)
- 2) Bupati Kepulauan Selayar

11. Provinsi Sulawesi Tenggara

- 1) Bupati Wakatobi
- 2) Bupati Konawe Kepulauan
- 3) Bupati Muna Barat
- 4) Bupati Buton Tengah
- 5) Bupati Buton Selatan

12. Provinsi Maluku

- 1) Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang *Kab. Kepulauan Tanimbar*)
- 2) Bupati Maluku Tengah
- 3) Bupati Maluku Tenggara
- 4) Bupati Buru
- 5) Bupati Seram Bagian Barat
- 6) Bupati Seram Bagian Timur
- 7) Bupati Kepulauan Aru
- 8) Bupati Maluku Barat Daya
- 9) Bupati Buru Selatan

13. Provinsi Maluku Utara

- 1) Bupati Halmahera Tengah
- 2) Bupati Halmahera Barat
- 3) Bupati Halmahera Timur
- 4) Bupati Halmahera Selatan
- 5) Bupati Halmahera Utara

- 6) Bupati Kepulauan Sula
- 7) Bupati Pulau Morotai
- 8) Bupati Pulau Taliabu

14. Provinsi Papua

- 1) Bupati Biak Numfor
- 2) Bupati Kepulauan Yapen

15. Provinsi Papua Barat

- 1) Bupati Kepulauan Raja Ampat



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sekretaris Jenderal DPD RI,
Komjen Pol. H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.
NRP. 70070207